

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Taufik Setiono ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa 04 Agustus 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Ketua,



Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag
NIP. 195601101987031001

Sekretaris,

Sekretaris,

 28/04/23

Ach. Room Fitrianto, SE
NIP. 197706272003121002

Penguji I,

Penguji I,



Drs. H. Sahid HM, M.Ag
NIP. 196803091996031002

Penguji II,

Penguji II,



Drs. Ach. Yasin, M.Ag
NIP. 196707271990031002

Pembimbing,

Pembimbing,

Dr. H. M. Fathoni Hasyim, M.Ag
NIP. 195601101987031001

Surabaya, 05 Agustus 2009

Mengesahkan,
Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

~~Dekan,~~



Dr. H. A. Raishal Haq, M. Ag
NIP.1950005201982031002

ABSTRAK

Taufik Setiono. Nim. C03302008, 2009. Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Menurut Pasal 7 Point (e) UU No. 31 Tahun 2002 dan UU No. 12 Tahun 2003 Dalam Perspektif Fikih Siyasa (Studi Terhadap Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Di DPW PPP Jatim). Skripsi Jurusan Siyasa Jinayah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimanakah implementasi pasal 7 point (e) UU No. 31 Tahun 2002 dan UU No. 12 Tahun 2003 pada rekrutmen calon anggota legislatif yang ada di DPW PPP Jatim. 2. Bagaimanakah perspektif fikih siyasah terhadap rekrutmen calon anggota legislatif di DPW PPP Jatim.

Berkenaan hal itu digunakan metode deskriptif-analisis untuk memberikan gambaran tentang rektumen calon anggota legislatif menurut pasal 7 point (e) UU. No 31 Tahun 2002 UU No. 12 Tahun 2003 dalam prespektif fikih siyasah di DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur. Sesuai dengan masalah tersebut, sumber data yang digunakan antara lain berupa dokumen/ arsip/ AD-ART partai dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian di atas.

Dari hasil penelitian dapat diketahui sebagai berikut: *Pertama*; Implementasi rekrutmen calon anggota legislatif yang dilakukan oleh DPW PPP Jatim telah sesuai dengan amanat dari pasal 7 point (e) undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 dan UU No. 12 Tahun 2003 tentang persyaratan calon anggota legislatif. Mekanisme rekrutmen calon anggota legislatif yang ada di DPW PPP Jatim Adalah tidak hanya berdasar basis dukungan saja, tetapi juga memperhatikan dari segi jenjang pendidikan, kualitas intelektual maupun emosional, dan pernah menempuh kaderisasi yang ada di partai.

Kedua, Pandangan fikih siyasah terhadap rekrutmen calon anggota legislatif di DPW PPP Jatim adalah bahwa sudah terpenuhinya unsur-unsur yang sesuai syariat Islam yaitu, bisa bersikap dengan adil, ilmu yang mampu membuatnya untuk berjihad, dan sikap bijaksana dalam menghadapi persoalan.

3. Implementasi Rekrutmen Calon Anggota Legislatif di DPW PPP Jatim	76
BAB IV ANALISA TERHADAP REKRUTMEN CALEG MENURUT PASAL 7 POINT (e) UU. NO 31 TAHUN 2002 DAN UU. NO 12 TAHUN 2003 DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH DI DPW PPP JATIM	77
A. Implementasi UU. No. 31 Tahun 2002 dan UU. No 12 Tahun 2003 pada Rekrutmen Calon Anggota Legislatif di DPW PPP Jatim	77
B. Perspektif Fikih SiyasaH Terhadap Rekrutmen Calon Anggota Legislatif di DPW PPP Jatim	83
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah hukum dan negara Islam telah muncul sejak masa Nabi Muhammad saw. Beliau mendirikan, membangun, dan mengatur masyarakat (Madinah), dan kemudian berhubungan dengan masyarakat dan negara lain. Pada masa Nabi saw, penjabaran ajaran Islam yang meliputi dunia dan akhirat, hubungan dengan Allah, manusia serta makhluk yang lain mudah dirujuk kepada Nabi saw, karena pada akhirnya beliau memang pemutus atau penentu yang diakui masyarakatnya. Kedudukan Rasulullah di Madinah sangat unik, selain beliau sebagai kepala negara namun juga sebagai pembawa risalah ajaran Allah. Sehingga memimpin tidak hanya dalam soal-soal dunia namun juga dalam hal-hal kerohanian. Ajaran Islam memang tercermin dalam sikap, perbuatan, dan perkataannya.¹

Tetapi setelah berpulang ke Rahmatullah, rujukan berpaling kepada lebih dari satu orang, karena tidak ada lagi yang menempati kedudukan unik tadi.² Semulia-mulianya seorang sahabat/ para tabi‘in dia hanyalah salah seorang dari para sahabat yang banyak, dengan segala kekuatan dan kelemahannya, dengan

¹ Abul A'la al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, h. 13

² *Ibid*, h. 15

³ Abul A'la al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, h. 19

Adapun istilah Politik Islam tentu akan segera dipahami sebagai politik berciri Islam atau konsep politik menurut Islam. Istilah ini wajar ada karena memang dalam kenyataannya terdapat banyak konsep politik yang kurang atau tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pertanyaan yang selanjutnya muncul ialah apakah Politik Islam itu ada? Apakah Islam mempunyai konsep khusus tentang politik, berbeda dengan konsep-konsep politik pada umumnya? Yang jelas, sampai batasan tertentu, Islam memang memiliki konsep yang khas tentang politik. Secara garis besar bahwa Islam dan politik terkait secara organik, atau tidak dapat dipisahkan.⁴ Keduanya terikat secara struktural oleh sistem religius Islam yang formal. Asumsi dan pandangan ini ialah, bahwa Islam memuat intisari ajaran agama dan negara sekaligus.⁵ Karena totalitas lengkap ajarannya, Islam menjadi niscaya untuk dipakai sebagai dasar untuk mengatur kehidupan suatu negara. Akan tetapi, tentu saja Islam tetap terbuka terhadap berbagai konsep politik yang senantiasa muncul untuk kemudian bisa melengkapi konsep yang sudah dimiliki, sepanjang tidak bertentangan dengan konsep baku yang sudah ada. Sifat terbuka Islam dalam masalah politik ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa Islam tidaklah menetapkan konsep politiknya secara amat rinci dalam segenap masalahnya. Ketidakrincian itu sendiri merupakan bagian dari kebijaksanaan Allah agar Islam bisa mengembangkan konsep politiknya dari waktu ke waktu tanpa harus terkungkung oleh rincian-rincian yang sangat mengikat, sementara kondisi

⁴ Donald E. Smith, *Agama dan Modernisasi Politik; Suatu Kajian Politik*, h. 28

⁵ Muhammad Yusuf Musa, *An Nizom al-Hukmi fi al-Islam*, h. 11

[illegible]

partisipasi politik rakyat dalam segala perkara-perkara umum dan juga dalam hukum.⁹ Tanggung jawab bersama dalam mengubah kemunkaran dalam politik atau perundang-undangan yang dilakukan ulil amri, memastikan prinsip pengawasan atas kinerja pemerintah.

Dalam politik Islam juga dikenal istilah *Ahl al- Ḥall wa al-‘Aqd* yang berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli fiqh merumuskan pengertian *Ahl al- Ḥall wa al-‘Aqd* sebagai seorang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warganegara).¹⁰ Dengan kata lain *Ahl al- Ḥall wa al-‘Aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Anggotanya berasal dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Mereka juga bertugas menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintah.¹¹ Namun semuanya mengacu pada pengertian

“Sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat (rakyat) dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka”.¹²

Sejalan dengan pengertian tersebut Abdul Hamid al-Anshari menyebutkan bahwa majlis syura yang menghimpun *ahl al-Syura* merupakan sarana yang digunakan rakyat atau wakil rakyatnya untuk membicarakan masalah-masalah

⁹ Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*, h. 39

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi*, h. 138

11 Imam al-Mawardi. (Terj). Fadli Bahri, *al-Ahkam as-Sulthaniyah*, h. 5

¹² Abdul Hamid Isma'il al-Anshari, *al-Syura wa Asaruha fi al-Dimuqrathiyah*, h. 233

prosedur pemilihan *Ahl al- Hall wa al-'Aqd*, ia menentukan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang anggota *Ahl al- Hall wa al-'Aqd* adalah, adil, mengetahui dengan baik kandidat kepala negara yang akan dipilih dan mempunyai kebijakan serta wawasan yang luas sehingga tidak salah dalam memilih kepala negara.¹⁷

Berbeda dengan al-Mawardi, Ibn Taimiyah dalam buku *The Political Thought of Ibn Taimiyah* karangan Qomaruddin Khan yang mengembangkan konsep *al-Syawkah* dalam teori politiknya. Menurutnya *ahl al-Syawkah* adalah orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi dan mempunyai kedudukan terhormat di masyarakat. Mereka menjadi semacam tempat untuk bertanya bagi masyarakat dan ucapan mereka menjadi “kata putus” bagi masyarakat tersebut.¹⁸

Di Indonesia lembaga musyawarah ini di kenal dengan sebagai dewan legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang anggotanya adalah dari masyarakat yang dipilih sendiri oleh rakyat melalui mekanisme tersendiri yaitu, pemilihan umum (Pemilu).

Dalam lembaga legislatif tersebut wakil rakyat direpresentasikan melalui perwakilan dari partai politik yang berhak untuk mengikuti pemilihan umum yang ada. Dalam partai inilah calon-calon akan di pilih dan didelegasikan untuk menduduki jabatan-jabatan yang ada dalam pemerintahan baik lembaga eksekutif

¹⁷ Imam al-Mawardi, *al-Ahkam*, h. 7

¹⁸ Lihat Qomaruddin Khan, *The Political Thought of Ibn Taimiyah*, (Terj) Anas Mahyuddin, *Pemikiran Politik Ibn Taimiyah*, hal. 228

Tidak ada satu pun negara yang tidak mengadakan rekrutmen politik untuk mengisi berbagai jabatan dibidang politik/pemerintahan. Bila hal itu tidak dilakukan, akan terjadi kekosongan dalam jabatan-jabatan politik/pemerintahan, karena tidak adanya alih generasi di kalangan para pemangku jabatan. Oleh karena itu yang menjadi persoalan dalam rekrutmen politik adalah, kapan rekrutmen dilakukan serta seperti apa cara mengadakan rekrutmen dilaksanakan.

Cara yang ideal dalam melakukan rekrutmen adalah digunakannya penilaian terhadap kemampuan sebagai tolok ukur utama dalam rekrutmen. Tujuannya untuk menghasilkan pemangku jabatan yang benar-benar layak memegang jabatan tersebut. Oleh karena itu, persaingan di antara para calon atas dasar kemampuan, menjadi penting di sini. Bila seseorang direktur tidak atas dasar kemampuannya (tapi atas dasar hubungan pribadinya dengan yang merekrut atau status sosialnya atau karena uang), maka yang akan dihasilkan adalah pejabat-pejabat yang tidak becus dan tidak layak untuk memegang jabatan bersangkutan.

Di mana pun juga, rekrutmen politik didasarkan atas persamaan nilai-nilai budaya politik antara yang merekrut dan yang direkrut. Pihak yang merekrut hanyalah akan merekrut orang-orang yang dianggap mempunyai nilai-nilai (values) yang sama dengan yang merekrut. Di samping itu, yang merekrut hanya akan merekrut seseorang bila ia

D. Tujuan Studi

Setiap penelitian harus mempunyai tujuan dan kegunaan agar penelitian tersebut akan menghasilkan sumbangan bagi ilmu pengetahuan yang akan menjadi sumber informasi pihak lain yang ingin mengadakan penelitian dan tidak menyimpang dari harapan yang dikehendaki.²³

1. Untuk menjelaskan implementasi UU. No. 31 Tahun 2002 dan UU No 12

²³ James A. Black, et al, *Metode Penelitian Sosial*, , h. 5-6

kemaslahatan bagi manusia itu sendiri, yang bersumber dari al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama fikih siyasah.

Jadi yang dimaksud dengan uraian judul diatas adalah proses seleksi warga masyarakat yang dilakukan oleh DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk dijadikan anggota legislatif menurut UU. No 31 Tahun 2002 dan UU No. 12 Tahun 2003 dilihat dari aspek fikih siyasah.

G. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Pengumpulan data adalah upaya untuk mengumpulkan data, dengan cara apa data itu dapat diperoleh dan cara apa data itu didapat, dalam mengumpulkan data itu dapat diperoleh melalui diri sendiri atau orang lain.²⁴

- Data yang berkaitan dengan mekanisme rekrutmen calon anggota legislatif di DPW PPP Jatim menurut UU No. 31 Tahun 2002
- Data yang berkaitan dengan mekanisme rekrutmen calon anggota legislatif di DPW PPP Jatim dalam perspektif fikih siyasah

2. Sumber Data

- a. Sumber primer, yakni sumber data yang berkaitan dengan masalah-masalah penelitian serta menjadi rujukan utama dalam penyusunan skripsi. Adapun sumber data tersebut adalah:

1. AD/ART Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

²⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, h. 24

2. Abdul Azis, Islam Politik: Pergulatan Ideologis PPP Menjadi Partai Islam

3. Buku-buku yang berkaitan langsung dengan masalah yang di bahas seperti:

- 1 Imam al-Mawardi. Terj. Fadli Bahri, *al-Ahkam as-Sulthaniyah*,
- 2 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik
Islam
- 3 Farid Abdul Khaliq, Fikih Politik Islam

b. Sumber sekunder, berupa sumber data pendukung antara lain: dokumen, artikel, buku-buku, dan makalah. Pemilihan terhadap buku-buku/ kitab-kitab tersebut harus sesuai dengan tujuan dalam pengumpulan data yaitu harus mencari data yang menjadi sumber penelitian yang dapat dibuat untuk mengukur permasalahan dan berkualitas sehingga menjadi valid.²⁵ Sumber seperti:

- 1 J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*.
- 2 Nuruddin' ITR, Peta Islam Politik Pasca – Soeharto
- 3 Anshari Thayib, Sistem Politik Dalam Pemerintahan Islam

²⁵ Sumadi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, h. 92-93

obyek yang diteliti apa adanya berdasarkan fakta-fakta aktual²⁶, yaitu kondisi di DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jatim, serta penerapan rekrutmen calon legislatif pada saat ini.

Dengan pola pikir deduktif, yaitu berangkat dari teori-teori yang bersifat umum, kemudian dikonsultasikan dengan data-data yang bersifat khusus yaitu pada rekrutmen calon anggota legislatif di DPW PPP Jatim kemudian di tarik kesimpulan yang bersifat khusus untuk mengetahui tinjauan fikih siyasah mengenai mekanisme rekrutmen calon anggota legislatif di DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jatim.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini dikelompokkan menjadi lima bab. Masing-masing bab terdiri dari sub-subbab, masing-masing sub-subbab mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian-rangkaian yang berkaitan, adapun sistematika sebagai berikut:

BAB I: Berisi tentang pendahuluan yang mengupas latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan studi, kegunaan hasil studi, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Berisi tentang teori-teori tentang pemilihan *Ahl al- Hall wa al- 'Aqd* dan Caleg menurut UU. No 31 Tahun 2002 dan UU No. 12 tahun 2003,

²⁶ Sumadi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, h. 94-95

BAB III: Berisi tentang mekanisme rekrutmen calon anggota legislatif di DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jatim, yang mengurai: A. Sejarah Partai Persatuan Pembangunan (PPP). B. Mekanisme rekrutmen calon anggota legislatif di DPW PPP Jatim. C. Implementasi rekrutmen calon anggota legislatif di DPW PPP Jatim.

BAB V: Penutup meliputi kesimpulan dan saran

LANDASAN TEORI TENTANG PEMILIHAN *AHL AL-ḤALL WA*
AL-‘AQD DAN CALEG MENURUT UU NO. 31 TAHUN 2002 DAN
UU NO. 12 TAHUN 2003

Dalam al-Qur'an di sebutkan tentang pemberian *Khalifah* dari Tuhan kepada orang-orang yang beriman dan beramal salih sebagai berikut:

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S. 2: 30).¹

¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 13

Kedua, kekuasaan untuk mengatur bumi, untuk memakmurkannya, untuk mengelola negara dan untuk menyejahterakan masyarakat dijanjikan kepada masyarakat beriman, bukan kepada seseorang atau suatu kelas tertentu. Konsekuensi logis dari pengertian ini adalah bahwa seluruh orang beriman menjadi tempat bersemayamnya khalifah.

Namun, hanya ditemukan dalam praktik Rasulullah saw, dan Khulafaur Rasyidin. Musyawarah dengan beragam gambaran dan peristiwa yang semuanya mengukuhkan akan komitmen penguasa dalam Islam untuk bermusyawarah dengan dewan permusyawaratan, dan tidak bersikap egois yang hanya memegang pendapatnya sendiri dalam perkara itu. Juga menunjukkan sejauh mana komitmen penguasa dengan pendapat dewan permusyawaratan.

meminta pendapat darinya.² Bisa juga disebut *syawarahu* dan *musyawaratun wa istisyaratan* yang berarti meminta pendapatnya; atau *asyara ‘alayya bi kodza*, yang berarti memperlihatkan kepadaku mengenai pendapatnya yang mempunyai masalah tentang itu, sehingga menjadi isyarat yang baik.³

Menurut istilah fikih, ditemukan berbagai pendapat bahwa majlis syura itu sama dengan *Ahl al-Ḥall wa al-‘Aqd* yakni suatu lembaga yang terdiri atas para ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang suatu masalah untuk mendapatkan kebenaran. Dengan mengadakan musyawarah lembaga ini akan lahir berbagai pendapat tentang masalah yang dihadapi dan hal tersebut akan lebih menghasilkan kebenaran daripada kalau hanya diputuskan sendiri. Menurut Hamid al-Anshary, Majlis Syura adalah sarana yang digunakan rakyat atau wakilnya untuk membicarakan kemaslahatan umat.⁴ Sejalan dengan pendapat itu, maka rakyatlah yang berhak untuk menentukan nasibnya serta menentukan siapa yang akan mereka angkat sebagai penguasa sesuai dengan kemaslahatan umum yang mereka inginkan.⁵

Bila al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber Islam tidak menyebutkan *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* atau dewan perwakilan rakyat, namun sebutan itu hanya ada di dalam turats fikih di bidang politik keagamaan dan pengambilan hukum

² Taqiyuddin An-Nabhani, *Nidhamul Hukmi fil Islam*, Terj: *Sistem Pemerintahan Islam*, h. 291-292

³ M. A. Qadir Abu Faris, *Hakikat Sistem Politik Islam*, h. 98

⁴ Abdul Hamid Isma'il al-Anshari, *al-Syūrā wa Asārūha fi al-Dīmuqrathiyah*, h. 231

⁵ Abd. Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* Jilid III. h. 1058

(०१)

Juga dalam firman-Nya (Q.S an-Nisa': 83)⁸

(۸۳)

Tidak diragukan lagi bahwa banyaknya sebutan kelompok *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* dalam turats fikih kita sejak awal Islam, yang mereka sebut dengan “Dewan Perwakilan Rakyat” atau ahlul ikhtiyar, yang para khalifah selalu merujuk kepada mereka dalam perkara-perkara rakyat juga berkomitmen dengan

⁸ *Ibid.*, h. 132

Pengertian yang hampir serupa diungkapkan oleh Moh. Abduh dalam buku *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, karangan J. Suyuthi Pulungan, yang menyamakan *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* dengan ulil'amri yang disebut dalam surat an-Nisa': 59

(०१)

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”¹⁰

Ia menafsirkan ulil ‘amri atau *Ahl al-Hall wa al-Aqd* sebagai kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat.¹¹ Abduh menyatakan, yang

⁹ Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*. h, 79

¹⁰ Departemen Agama RI, *al-Our'an*..., h. 128

¹¹ Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran...*, h. 67

dimaksud ulil ‘amri adalah “Golongan *Ahl al-Hall wa al-‘Aqd* dari kalangan orang-orang muslim. Mereka itu adalah para amir, hakim, ‘ulama, pemimpin militer, dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat Islam dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik.¹²

Kepemimpinan Rasulullah saw yang bersifat demokratis terlihat pada kecenderungan beliau menyelenggarakan musyawarah, terutama jika menghadapi masalah yang belum ada wahyunya dari Allah swt.²⁰ Bersamaan dengan itu beliau pun banyak menganjurkan umatnya agar selalu bermusyawarah, yang dinyatakan bahwa umat Islam supaya tidak meninggalkan jama'ah. Dengan demikian berarti hak seseorang dalam mengemukakan pendapat sangat dihormati, namun setelah kesepakatan dicapai setiap anggota jama'ah wajib menghormati dan melaksanakannya.

Sejarah telah membuktikan bahwa Rasulullah saw tidak menunjuk seorangpun sebagai pengganti beliau memimpin pemerintahan Islam setelah beliau wafat. Juga tidak memberi gambaran-gambaran kriteria apa yang harus digunakan untuk memilih penggantinya itu.²¹ Karena tidak adanya isyarat-isyarat yang jelas ini, dan dengan mengambil dasar pada perintah al-Qur'an atas segala urusan umat diputuskan secara musyawarah, para sahabat dengan tepat telah menyimpulkan bahwa sepeninggal Rasulullah saw seleksi dan penunjukkan kepala negara Islam telah diserahkan kepada kehendak pemilihan dari kaum

²¹ Anshari Thayib, *Sistem Politik Dalam Pemerintahan Islam*, h.46

Setelah wafatnya Nabi, kaum muslimin di Madinah membentuk kelompok-kelompok politik yang berbeda dengan pemimpinnya masing-masing, seperti kelompok Anshar dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah, kelompok Muhajirin yang memberi dukungan kepada Abu Bakar dan Umar, serta kelompok Bani Hasyim yang memberi dukungan yang kuat kepada Ali. Masing-masing

²⁴ *Ibid.*, h. 260

muslim, yang pada gilirannya menerimanya.²⁷

Setelah terjadi penikaman politik terhadap Umar, maka para cerdik pandai kaum muslimin meminta agar beliau dapat menunjukkan calon penggantinya, tetapi beliau menolak usulan para tokoh tersebut. Namun, menanggapi situasi politik pada zamannya, Umar sebelum meninggalnya membentuk badan pemilihan yang bertugas memilih calon dan memerintahkan mereka untuk memilih salah seorang dari mereka sebagai penggantinya. Badan pemilihan tersebut terdiri dari *Ali, Usman, Abdurrahman, Sa'ad, Zubair dan Thalhah*.²⁸ Salah seorang dari putra beliau yaitu Abdullah ditambahkan beliau kepada sahabat-sahabat, tetapi dia hanyalah mempunyai hak untuk memilih dan tiada berhak untuk dipilih.²⁹

Dewan tersebut, melalui proses eliminasi memberikan wewenang kepada Abdurrahman untuk merekomendasikan apakah Ali atau Usman yang akan menggantikan Umar. Kebanyakan dari mereka mendukung Usman, bahkan Abdurrahman mewawancarai Ali dan Usman mengenai bagaimana mereka akan memerintah negara apabila menjadi pemimpin. Akhirnya Abdurrahman mendukung Usman, dan Usman terpilih sebagai calon tunggal, kemudian masyarakat muslim lainnya memberikan sumpah setia kepadanya.³⁰

²⁷ al-Maududi, *The Islamic Law...*, h. 256-257

²⁸ Mumtaz Ahmad, *State Politic...*, h. 64

²⁹ A. Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, h. 268

³⁰ Mumtaz Ahmad, *State Politic*, h. 64-65

yang empat. Hanya pada masa Umar, terbentuk “Team Formatur” yang beranggotakan enam orang untuk memilih khalifah setelah ia wafat. ‘*Ulama* fikih menyebut anggota formatur tersebut sebagai *Ahl al- Hall wa al-‘Aqd*.³⁴

(۳۴)

³⁸ Mumtaz Ahmad, *State Politic ...*, h. 86-87

[illegible]

“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. dan Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik”

1. Islam menggunakan istilah kekhalifaan, bukanlah kedaulatan. Karena menurut Islam kedaulatan hanya di tangan Tuhan. Siapapun yang memegang kepemimpinan (kekuasaan) dan siapapun yang memerintah sesuai dengan hukum pastilah merupakan khalifah dari penguasa tertinggi dan tidak akan berwenang mengarahkan kekuasaan apapun kecuali kekuasaan yang telah di delegasikan kepadanya.
2. Kekuasaan untuk memerintah bumi telah dijanjikan kepada seluruh masyarakat mukmin. Ayat ini tidak menyatakan bahwa orang atau kelompok tertentu yang akan meraih kedudukan ini.⁴³

⁴³ al-Maududi, *The Islamic Law...*, h. 169

Dari sini dapat disimpulkan bahwa kekhalifahan yang dianugerahkan tuhan kepada yang beriman merupakan kekhalifahan umum, tanpa mengistimewakan keluarga, kelompok, atau golongan tertentu.

Dalam al-Qur'an surat An-Nisa' 4: 58.⁴⁴

$$(\varepsilon \wedge)$$

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”

Ayat tersebut menegaskan adanya kewajiban memelihara amanah dan menegakkan keadilan dalam kepemimpinan, karena itu dalam mengurus kepentingan umat, pemimpin-pemimpin atau pejabat pemerintah harus mengutamakan kecakapan dan kepemimpinan, bukan karena ada ikatan primordial.

Berdasarkan konsep keadilan dan amanah, wanita memiliki hak menjadi pemimpin, apabila dia mempunyai kemampuan dan terpilih melalui musyawarah yang adil dan obyektif.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an...*, h. 128

ujian praktek dan pelaksanaan kerja yang selanjutnya dengan kredibilitas yang tinggi mereka memperoleh simpati publik, dengan sendirinya rakyat mengabsahkan mereka menjadi anggota dewan permusyawaratan.⁵¹

Pada masa modern, sejalan dengan masuknya pengaruh pemikiran politik barat terhadap Islam, pemikiran tentang *Ahl al-Ḥall wa al-‘Aqd* juga berkembang. Para ulama siyasah mengemukakan pentingnya pembentukan lembaga permusyawaratan sebagai representasi dari kehendak rakyat. Mereka mengemukakan gagasan tentang *Ahl al-Ḥall wa al-‘Aqd* dengan mengkombinasikannya dengan pemikiran-pemikiran politik yang berkembang di barat. Dalam praktiknya, mekanisme pemilihan anggota *Ahl al-Ḥall wa al-‘Aqd* atau dewan perwakilan ini menurut al-Anshari dilakukan melalui beberapa cara:

1. Pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala. Dalam pemilu ini, anggota masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan memilih anggota *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* sesuai dengan pilihannya.
2. Pemilihan anggota *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* melalui seleksi dalam masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat akan melihat orang-orang yang terpadang dan mempunyai integritas pribadi serta memiliki perhatian yang besar untuk kepentingan umat. Merekalah yang kemudian dipilih untuk menjadi anggota *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*.

⁵¹ *Ibid.*, h. 269

3. Disamping itu, ada juga anggota *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* yang diangkat oleh kepala Negara.⁵²

Diantara beberapa cara diatas, cara yang pertamalah yang lebih kecil kelemahannya, karena cara ini mencerminkan kehendak rakyat secara bebas. Mereka tidak perlu merasa takut untuk memilih siapa calon anggota *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* yang akan mewakilinya, sesuai dengan pilihan terbaiknya. Sedangkan cara kedua sangat subyektif sehingga bisa menimbulkan penyimpangan. Sedangkan cara yang terakhir tidak kondusif bagi independensi anggota *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* untuk bersikap kritis terhadap penguasa, karena diangkat oleh kepala negara.

D. Mekanisme Rekrutmen dan Persyaratan Caleg Menurut Pasal 7 Point (e) UU No.

31 Tahun 2002 Dan UU No. 12 Tahun 2003

1. Pengertian Rekrutmen Calon Anggota Legislatif

Pola rekrutmen calon anggota legislatif menentukan kualitas DPR yang akan dihasilkan setelah pemilu. Oleh karena itu, pimpinan partai juga bertanggung jawab terhadap hadirnya DPR yang berbobot. Bila pimpinan partai mampu menampilkan para caleg dengan keahlian yang memadai dan kemampuan mewakili yang cukup kuat, dapat diharapkan bahwa DPR yang dihasilkan akan semakin mampu menjalankan fungsinya.

⁵² al-Anshari, *al-Syūrā wa Āsarūha...*, h. 251

Legislatif adalah lembaga pemerintahan yang berwenang untuk membuat undang-undang, selain itu juga berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja lembaga eksekutif. Jadi pengawasan bisa dilakukan oleh partai politik bersangkutan yang kader-kadernya telah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.⁵⁶ Lembaga legislatif sebagai lembaga atau badan pembentuk peraturan perundang-undangan di semua negara yang mengenakan sistem parlementer bekerja berdasarkan proses kegiatan yang dituntut oleh pembentukan sesuatu berdasarkan wewenang yang berlaku. Wewenang yang berlaku adalah wewenang yang diakui untuk membentuk undang-undang adalah Presiden berdasarkan hak inisiatif, DPR berdasarkan

⁵⁶ Fadilah Putra. *Partai politik dan Kebijakan Publik*, h.15

telah dikenal oleh mereka. Oleh karena itu, ada baiknya bila setiap partai mengadakan seleksi terhadap para caleg berdasarkan pemahaman mereka terhadap daerah pemilihan masing-masing, dengan melihat riwayat hidup mereka dan pengetahuan mereka tentang masyarakat di daerah pemilihan.

Keahlian dalam rekrutmen caleg menempati kedudukan kedua setelah kedekatan dengan daerah pemilihan. Walau bagaimanapun ahlinya seorang anggota legislatif, ia tentu saja tidak akan mampu membela kepentingan rakyat di daerah pilihannya bila ia tidak mengetahui keadaan dan perkembangan masyarakat di sana. Akibatnya, keahliannya itu tidak begitu berguna bagi masyarakat yang diwakilinya. Keadaan seperti ini menunjukkan bahwa fungsi utama wakil rakyat itu (yakni membela kepentingan rakyat) tidak dapat ia jalankan.

Kedekatan para anggota legislatif dengan daerah pemilihan masing-masing, perlu dijadikan salah satu tolok ukur penilaian terhadap rakyat. Mereka yang tidak pernah atau jarang berkunjung ke daerah pemilihan masing-masing selama reses untuk memahami perkembangan masyarakat di sana, tidak selayaknya dicalonkan kembali dalam pemilu berikutnya. Kunjungan seorang anggota DPR ke daerah pemilihan seharusnya dianggap sebagai perjalanan dinas yang diperlukan untuk memperoleh masukan bagi pelaksanaan tugas-tugasnya.

Masa perekrutan calon anggota legislatif oleh partai politik telah dilakukan untuk mempersiapkan keanggotaan legislatif, apakah yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ataukah di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota lewat proses pemilihan umum. Pemilu memang secara *eksplisit* tidak diatur bahkan tidak sama sekali dalam UUD 1945, bisa saja orang mengatakan pemilu sebagai tidak konstitusional atau menganggapnya dilaksanakan tanpa prosedur yang benar. Di Indonesia pemerintahan berdasarkan asas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, antara lain menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia disusun dalam suatu undang-undang dasar yang terbentuk dalam

suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, Negara harus berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.⁵⁸

Proses rekrutmen yang telah dilakukan oleh partai-partai politik sah-saja dilakukan mengingat ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karena itu, selain menentukan sistem pemilu seperti apa yang akan digunakan, juga yang terpenting adalah bagaimana mengatur mekanisme rekrutmen calon legislatif oleh partai politik menjadi lebih demokratis melalui Undang-Undang Partai Politik (UU Parpol).

Undang-undang nomor 31 tahun 2002 dan UU No. 12 tahun 2003 merupakan undang-undang yang berhubungan erat dengan pemilu, sehingga undang-undang partai politik dan pemilu sering disebut sebagai undang-undang politik. Pada masa orde baru undang-undang partai politik disebut dengan undang-undang partai politik dan Golkar, yang hanya menyangkut dua partai politik yaitu, PPP dan PDI serta Golkar (meskipun tidak disebut sebagai partai politik tetapi perannya berfungsi sebagai partai politik).⁵⁹ Undang-undang ini di buat untuk menghadapi pemilu tahun 2004 dengan tujuan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi, menjunjung tinggi kebebasan kesetaraan, kebersamaan dan kejujuran.

⁵⁸ Arbi Sanit, *Perwakilan Politik Di Indonesia*, h. 1

⁵⁹ Topo Santoso dan Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu dan Mengawal Demokrasi*, h. 5

gender bukan suatu kodrat ketentuan yang telah ditetapkan Tuhan, melainkan suatu perbedaan yang di sosialisasikan dalam waktu yang lama. Gender sesungguhnya berkaitan erat dengan proses keyakinan bagaimana laki-laki dan perempuan diharapkan untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan ketentuan sosial dan budaya di mana mereka berada. Peran yang menentukan terjadinya perbedaan tersebut adalah terdapat pada aturan masyarakat itu sendiri, bukan karena perbedaan biologis.⁶¹

Terkait proses rekrutmen calon anggota legislatif, yang perlu mendapat asupan adalah persoalan kapasitas, kapabilitas dan akseptabilitas calon anggota legislatif kita agar dapat memenuhi fungsi legislatifnya, baik dalam kerangka melaksanakan fungsi representasi, legislasi, anggaran dan pengawasan secara lebih berkualitas. Dalam arti, calon anggota legislatif yang direkrut oleh partai-partai politik kita tidak hanya memenuhi persyaratan umum atau minimal sebagaimana diatur dalam pasal Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, namun perlu pula menetapkan syarat-syarat khusus untuk memenuhi aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Undang-undang nomor 12 tahun 2003 adalah undang-undang yang mengatur tentang tata cara pemilihan umum (PEMILU) anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dalam undang-undang tersebut telah diatur tata cara pengajuan

⁶¹ Mansour Fakih, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, h. 15

**MEKANISME REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF
DI DPW PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) JATIM**

1. Masa Orde Baru

51

Para deklaratoren itu adalah;

- a. KH Idham Chalid, Ketua Umum PB Nadhlatul Ulama;
- b. H.Mohammad Syafa'at Mintaredja, SH, Ketua Umum Partai Muslimin Indonesia (Parmusi);
- c. Haji Anwar Tjokroaminoto, Ketua Umum PSII;
- d. Haji Rusli Halil, Ketua Umum Partai Islam Perti; dan
- e. Haji Mayskur, Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di Fraksi DPR.

Suatu deklarasi yang dirumuskan dari hasil rapat presidium badan pekerja dan pimpinan fraksi kelompok partai persatuan pembangunan

¹ DPW PPP Jatim, *Buku Pintar*, h. 22

² Syamsudin Haris, *PPP dan Politik Orde Baru*, h. 148

menyebutkan bahwa keempat partai politik Islam telah seia-sekata untuk mefusikan politiknya dalam satu partai politik yang bernama Partai Persatuan Pembangunan.³

Pemilu pertama di masa Orde Baru (1971) mengantarkan terbentuknya suatu format politik baru yang dikenal sebagai '*Hegemony Party Sistem*' dengan Golkar dan ABRI sebagai pilarnya. Kemenangan Golkar dalam pemilu tersebut memberikan legitimasi pemerintah Orde Baru untuk melaksanakan restrukturisasi sistem politik nasional. Restrukturisasi ini yang melahirkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).⁴ Sebelum membentuk PPP, negara Orde Baru telah melakukan usaha-usaha untuk mengurangi kalau tidak melenyapkan karakter Islam dari partai-partai Islam seraya mendepak orang-orang yang dianggap tidak akomodatif terhadap kepentingan negara dari barisan kepemimpinannya. Kebencian Orde Baru terhadap Islam politik juga ditampakkan dalam pemakaian nama pengelompokkan fraksi Islam di parlemen. Mulanya bernama "golongan spiritual" lalu menjadi "kelompok persatuan" dan terakhir menjelma menjadi partai persatuan pembangunan.⁵ Orde Baru sesungguhnya menghadapi situasi dilematis. Di satu sisi, penciptaan pemerintahan yang stabil mensyaratkan homogenitas sosial dan konsensus politik, sementara di sisi lain, pluralitas

³ DPW PPP Jatim, *Buku Pintar*, h. 94

⁴ Abdul Azis, *Politik Islam Politik: Pergulatan Ideologis PPP Menjadi Partai Islam*, h. 2

⁵ Nuruddin' ITR, *Peta Islam Politik Pasca – Soeharto*, h. 152

Pada periode ini, karakter PPP seperti diatas ternyata melahirkan medan baru bagi pertarungan internal dari faksi-faksi yang membentuknya. Sekalipun demikian, meski di tengah marginalisasi politik Orde Baru, PPP tetap berusaha konsisten untuk memperjuangkan *platform* fundamental politiknya. Latar belakang elit dan semangat ideologis yang ada di dalamnya ikut menentukan corak politik PPP dalam melawan penetrasi dan intervensi rezim di kala itu. Sikap keras partai ini sering menjadi pilihan terakhir di saat kepentingan Islam di nilai terancam. Sikap itu terrefleksikan di berbagai pertarungan di tingkat parlemen, seperti pada kasus pembahasan aliran kepercayaan, perjudian, rencana penetapan P4 dalam sidang umum (SU) MPR 1978, Rancangan Undang-Undang (RUU) perkawinan tahun 1973,

PPP berasaskan Islam dan berlambangkan Ka'bah. Akan tetapi dalam perjalanannya, akibat tekanan politik kekuasaan Orde Baru, PPP pernah menanggalkan asas Islam dan menggunakan asas Negara Pancasila sesuai dengan sistem politik dan peraturan perundangan yang berlaku sejak tahun 1984. Pada periode ini terjadi perubahan yang mendasar yang menyangkut basis ideologi politik PPP. Untuk kali kedua rezim Orde Baru melakukan restrukturisasi politik, yakni melalui UU No. 5 Tahun 1985. UU ini mengharuskan semua organisasi kemasyarakatan (ormas) dan partai politik, termasuk PPP, untuk menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Melalui kebijakan tersebut, PPP 'dipaksa' untuk melepaskan asas dan lambangnya.⁸ Mulai saat itu, PPP mengalami disorientasi ideologis, pasalnya artikulasi politik Islam yang melambangkan identitas politiknya semakin kabur. Pada Muktamar I PPP tahun 1984 PPP secara resmi menggunakan asas Pancasila

⁸ *Ibid.*, h. 5

dan lambang partai berupa bintang dalam segi lima.⁹ Pemberlakuan asas tunggal pancasila adalah puncak strategi Orde Baru untuk menyeragamkan seluruh makna dan potensi politik yang ada dalam masyarakat. Kecenderungan watak politik Orde Baru inilah yang kemudian melahirkan kekuasaan *otoritarian*. Heterogenitas masyarakat, terutama yang berbasis agama, dipandang semata-mata sebagai potensi konflik berbahaya, sehingga harus diamankan melalui penyeragaman ideologi, yakni Pancasila.

2. Pasca Orde Baru

Perubahan mendasar yang terjadi pada sistem politik Orde Baru menjadi orde reformasi, juga berpengaruh secara mendasar terhadap paradigma politik para pelakunya. Gugatan dan keinginan kuat untuk membongkar sistem politik Orde Baru yang telah berjaya selama 30 tahun menjadi basis utama bagi gerakan politik orde reformasi. Sementara itu muncul euforia masyarakat dalam meluapkan partisipasi politiknya karena yang selama ini tersumbat. Krisis multidimensi sebagai akibat dari sistem politik lama telah membawa korban jatuhnya rezim Soeharto dan kesengsaraan rakyat. Kondisi ini menjadi referensi penting bagi pembentukan sistem politik yang ingin diwujudkan di masa mendatang. Keinginan kuat untuk membangun sistem politik baru yang demokratis menjadi agenda yang didesakkan oleh semua elemen politik.

⁹ *Ibid.*, h. 7

Munculnya banyak partai di masa ini adalah salah satu fenomena terpenting yang patut dicatat. Fenomena ini menjadi bagian dari ledakan partisipasi politik massa yang sebelumnya pernah tersumbat. Pada konteks inilah, yang diiringi dengan keinginan kuat untuk menciptakan sistem politik baru yang demokratis, dorongan untuk menggali potensi-potensi politik yang di dasarkan pada keyakinan-keyakinan dasar (ideologis, agama) yang dimiliki bersama menjadi bagian dari dinamika obyektif di era ini. Kembalinya potensi-potensi politik aliran muncul sebagai wacana yang cukup kuat pada era reformasi. Wacana ini merupakan cermin dari pluralisme sosial politik masyarakat Indonesia, serta kuatnya kepentingan dan persaingan antar potensi tersebut. Lahirnya partai-partai yang berbasis Islam seperti PKB yang mempresentasikan NU, dan PAN sebagai representasi Muhammadiyah, maupun partai-partai lainnya yang mengandalkan basis dukungan umat Islam, tak pelah seolah menjadi sebuah tuntutan tersendiri bagi PPP untuk memperbaharui dan mengkaji ulang eksistensinya.

Runtuhnya kekuasaan politik era Orde Baru, membawa tantangan baru bagi PPP. Partai yang telah cukup lama malang-melintang dalam kancah politik nasional selama Orde Baru ini dihadapkan pada kenyataan tentang memori kolektif rakyat yang menempatkan PPP sebagai pendukung politik Orde Baru. Akibat keterlibatan dalam perpolitikan Orde Baru, PPP kurang memperoleh apresiasi sebagai elemen dan kekuatan pendukung reformasi.

Pada era reformasi ini memberi wacana baru sekaligus membuka babak baru dalam sejarah politik PPP. Setelah tumbanganya Orde Baru yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998 dan dia digantikan oleh Wakil Presiden B.J.Habibie, PPP kembali menggunakan asas Islam dan lambang Ka'bah. Secara resmi hal itu dilakukan melalui Mukhtamar

[illegible]

Pergantian lambang dan asas partai menjadi lembaran sejarah baru bagi PPP. Kembalinya PPP ke asas Islam merupakan kembalinya PPP ke khitah-1973. Pergantian asas PPP ini juga menandai fase baru dalam pergeseran dan dinamika internal yang bersifat ideologis PPP, yang semula di hancurkan oleh rezim Orde Baru melalui 'deideologisasi politik'. Dari kembalinya PPP ke asas Islam di harapkan untuk bisa memperbaiki citra politik PPP yang kritis terhadap pemerintah. Sementara itu sebelum keputusan tentang pergantian asas dan simbol diambil, secara kelembagaan PPP telah mencermati perjalanan dan kondisi bangsa Indonesia selama tiga

¹² Abdul Azis, *Politik Islam...*, h. 6

Pertama, yakni sebagai langkah pragmatis, hal ini tidak terlepas dari tantangan baru yang di hadapi PPP di era multi partai ini. Munculnya berbagai partai politik baru yang mengandalkan basis dukungan selama ini dimiliki oleh PPP, hal ini memunculkan kegamangan dan skeptisme di dalam tubuh PPP.

Kedua, merupakan refleksi dari salah satu kebutuhan pokok PPP sebagai partai politik, yakni merumuskan (kembali) basis ideologisnya selepas diceraikan dari Islam politik pada masa Orde Baru. Deideologisasi politik Orde Baru diakui telah memandulkan Islam politik sebagai pusat orientasi perjuangan.¹³

Berdasarkan pada pasal 2 dan 3 AD/ART Partai Persatuan Pembangunan berazaskan Islam dan bertujuan mewujudkan masyarakat

[illegible]

memperhatikan nilai-nilai agama terutama nilai-nilai ajaran Islam, dengan mengembangkan ukhuwah basyariyah (persaudaraan sesama manusia). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang berkembangnya neo-feodalisme, faham-faham yang memecahkan martabat manusia, proses dehumanisasi, diskriminasi, dan budaya kekerasan.¹⁵

6. Struktur Kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah PPP Jatim

Berdasarkan Surat Ketetapan No. 181/SK/DPP/W/XII/2008 Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan, struktur pengurus DPW PPP Jatim ialah sebagai berikut:

a. **Pelaksana Harian:**

Ketua : Drs. H. Musyaffa' Noer

Wakil Ketua : KH. Machrus Yasin

Sekretaris : H. Muhammad Mirdasy, S. Ip

Wakil Sekretaris : Drs. KH. RPA. Mujahid Anshory, M.Si

Bendahara : Hj. Munjidah Wahab

Anggota : H. Salim Quraissy, S.Ag

Anggota : Anshori Baidlowi

b. Majelis Pertimbangan Wilayah:

Ketua : Drs. Imam Suhardjo HM

Sekretaris : Ir. H. M. Romahurmuziy, MT

Anggota : Drs. H. Lukman Hakim Saefuddin

H. Moh. Arwani Thomafi, S.Ag

Dra. Hj. Mursyidah Thahir, MA¹⁷

¹⁷ Surat Ketetapan . DPP PPP No. 181/SK/DPP/W/XII/2008 Tentang: Penunjukkan Pelaksana Tugas Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jawa Timur

1. Syarat – Syarat Calon Anggota Legislatif di DPW PPP Jatim

Di mana pun juga, rekrutmen politik didasarkan atas persamaan nilai-nilai budaya politik antara yang merekrut dan yang direkrut. Pihak yang merekrut hanyalah akan merekrut orang-orang yang dianggap mempunyai nilai-nilai (*values*) yang sama dengan yang merekrut. Di samping itu, yang merekrut hanya akan merekrut seseorang bila ia yakin orang tersebut akan tetap mempertahankan nilai-nilai yang mereka anut bersama. Di sini terlihat pentingnya kaderisasi. Kaderisasi akan membantu dalam menghasilkan rekrutmen yang ideal.

Syarat-syarat seseorang untuk menjadi calon anggota legislatif selain yang telah di atur undang-undang pemilu, di Dewan Pengurus Wilayah PPP

65

a. Aspek Loyalitas, meliputi :

- 1) Lamanya bakal calon bergabung atau menjadi kader partai
- 2) Keaktifan dalam kepengurusan partai di semua tingkatan
- 3) Keterlibatan di dalam pelaksanaan program-program perjuangan partai.

b. Aspek Akseptabilitas, meliputi :

- 1) Diterima dan dikenal oleh masyarakat dan konstituen
- 2) Memiliki pemahaman dan kedekatan geografis, kultur dan emosionalitas dengan masyarakat dan konstituen
- 3) Memiliki pemahaman terhadap permasalahan masyarakat dan konstituen

c. Aspek Kapabilitas, meliputi:

- 1) Riwayat Hidup
- 2) Keahlian dan kemampuan khusus di bidang tertentu
- 3) Kepemimpinan, dan
- 4) Kemampuan berkomunikasi

d. Aspek Kontribusi kepada partai ditentukan besarnya oleh dewan pimpinan pusat¹⁸

¹⁸ Surat Ketetapan . DPP PPP No. 1003/KPTS/DPP/VI/2008 Pasal 6

legislatif selama ini. Akhirnya, kita hanya bisa menyatakan bahwa fungsi legislatif kita masih terbatas hanya baru sampai “menampung aspirasi masyarakat”. Pangkal persoalan dari rangkaian panjang tersebut sebenarnya adalah pada rekrutmen politik. Kualitas anggota legislatif sangat ditentukan dengan bagaimana mekanisme rekrutmen. Partai dalam hal ini berperan penting sebagai agen yang menyediakan dan mempersiapkan calon-calon politisi yang akan duduk di kursi parlemen. Aktivitas partai politik seharusnya menyediakan stok politisi yang dapat memerankan fungsinya secara memadai sehingga begitu tiba masa pencalonan tidak hanya asal comot, dan menerima kutu loncat, namun membangun kaderisasi partai dan inilah yang disebut dengan rekrutmen politik yang baik dan benar. Bentuk rekrutmen dipengaruhi oleh sistem kepartaian dan sistem pemilu yang dikembangkan. Namun, apapun sistemnya rekrutmen dari partai politik tidak akan lepas dari dua sisi proses, yaitu; menyusun kriteria yang akan menjadi kualifikasi untuk melakukan rekrutmen dan bagaimana mekanisme rekrutmen yang akan dilakukan. Kriteria atau kualifikasi yang dapat ditentukan untuk menentukan rekrutmen calon anggota legislatif adalah standar minimum yang harus dimiliki oleh seorang untuk dapat dicalonkan. Kriteria atau kualifikasi disusun berbentuk aturan atau persyaratan. Berkaitan dengan pencalonan anggota legislatif, setidaknya ada dua kualifikasi yang seharusnya dapat dipenuhi, yaitu kualifikasi yang ditetapkan

oleh negara melalui undang-undang dan kualifikasi yang ditetapkan oleh partai politik. Kualifikasi yang ditetapkan oleh negara biasanya bersifat umum, longgar dan berkaitan dengan permasalahan ideologi kebangsaan. Sedangkan kualifikasi yang ditetapkan oleh partai politik adalah menetapkan sejumlah persyaratan lain. Persyaratan tersebut selain merujuk pada ideologi partai, juga harus berkorelasi dengan pelaksanaan fungsi lembaga legislatif kedepan.

Mekanisme rekrutmen yang dilakukan oleh DPW PPP Jatim dilaksanakan oleh badan tersendiri yang dibentuk di masing-masing tingkatan pengurus, badan tersebut adalah Lajnah Pemenangan Pemilu Legislatif (LP2L). Lembaga ini yang berhak melaksanakan proses rekrutmen dan seleksi calon anggota legislatif di semua tingkatan yang ada di Partai Persatuan Pembangunan.²¹

Mekanisme rekrutmen yang dilaksanakan oleh LP2L ini ada beberapa tahapan, yaitu:

- a. Tahapan Pengumuman, Pendaftaran, dan Seleksi Administrasi. Meliput:
 - 1) LP2L Pusat, LP2L wilayah dan cabang dapat melakukan pengumuman pendaftaran untuk bakal calon secara terbuka melalui media massa dan surat pemberitahuan kepada seluruh pengurus, kader dan simpatisan sesuai dengan tingkatannya masing-masing.

²¹ Surat Ketetapan . DPP PPP No. 1003/KPTS/DPP/VI/2008 Pasal 2

- 2) Dalam melaksanakan tahapan pendaftaran, bakal calon mengisi formulir sebagai berikut:
 - a) Formulir Permohonan Bakal Calon
 - b) Formulir Penugasan
 - c) Formulir Orientasi Bakal Calon
- 3) Dalam melaksanakan tahapan pendaftaran, calon mengisi formulir sebagai berikut:
 - a) Formulir Permohonan Calon
 - b) Formulir Orientasi Jurkam
 - c) Formulir Daerah Pemilihan
 - d) Formulir Orientasi Calon
 - e) Formulir lainnya yang di syaratkan oleh KPU, KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/ Kota
 - f) Formulir pernyataan kontrak politik
 - g) Formulir pernyataan kontribusi
 - h) Formulir kepatuhan kepada partai
 - i) Formulir pembinaan konstituen, dan
 - j) Formulir Pakta Anti Korupsi
- 4) LP2L pusat, wilayah dan cabang melaksanakan seleksi administrasi sesuai dengan undang-undang pemilu dan AD/ART Partai

- a) LP2L pusat, wilayah dan cabang menetapkan nilai bakal calon, yang meliputi empat aspek yaitu, aspek loyalitas terhadap partai, akseptabilitas, kapabilitas dan kontribusi terhadap partai
- b) Aspek loyalitas sebagaimana dimaksud diatas meliputi:
 - (1) Lamanya bakal calon bergabung atau menjadi kader partai
 - (2) Keaktifan dalam kepengurusan partai di semua tingkatan
 - (3) Keterlibatan di dalam pelaksanaan program-program perjuangan partai.
- c) Aspek akseptabilitas meliputi:
 - (1) Diterima dan dikenal oleh masyarakat dan konstituen
 - (2) Memiliki pemahaman dan kedekatan geografis, kultur dan emosionalitas dengan masyarakat dan konstituen
 - (3) Memiliki pemahaman terhadap permasalahan masyarakat dan konstituen
- d) Aspek kapabilitas, meliputi:
 - (1) Riwayat Hidup
 - (2) Keahlian dan kemampuan khusus di bidang tertentu
 - (3) Kepemimpinan, dan
 - (4) Kemampuan berkomunikasi
- e) Aspek Kontribusi kepada partai ditentukan besarannya oleh dewan pimpinan pusat

- b. Tahapan seleksi khusus: dalam melaksanakan tugas diatas LP2L pusat, wilayah dan cabang dapat bekerjasama dengan lembaga profesional untuk melakukan *Fit and Proper Test* (uji kelayakan dan kepatutan) terhadap bakal calon.
- c. Tahapan Penugasan, meliputi:
 - 1) LP2L Pusat, wilayah dan cabang memberikan penugasan kepada bakal calon, antara lain:
 - 2) Pembentukan Kader Penggerak Partai (KPP) bagi bakal calon anggota DPR di wilayah DPC bersama dengan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/ Kota
 - 3) Pembentukan Kader Penggerak Partai (KPP) bagi bakal calon anggota DPRD Provinsi di wilayah DPC bersama dengan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/ Kota
 - 4) Pembentukan Kader Penggerak Partai (KPP) bagi bakal calon anggota DPRD Kabupaten/ Kota
 - 5) Melakukan rekrutmen anggota partai melalui kegiatan pemberian Kartu Tanda Anggota (KTA) oleh bakal calon
 - 6) Membantu pelaksanaan program LP2L di tingkat cabang, antara lain penyiapan tenaga saksi dan pelatihan saksi

- 5) Evaluasi dan penilaian DPC merupakan bahan pertimbangan LP2L Pusat dalam melakukan evaluasi dan penilaian akhir terhadap bakal calon anggota DPR
 - 6) Evaluasi dan penilaian DPC merupakan bahan pertimbangan LP2L wilayah dalam melakukan evaluasi dan penilaian akhir terhadap bakal calon anggota DPRD Provinsi
 - 7) Evaluasi dan penilaian PAC merupakan bahan pertimbangan LP2L cabang dalam melakukan evaluasi dan penilaian akhir terhadap bakal calon anggota DPRD Kabupaten/ Kota
- e. Tahapan Rekomendasi, meliputi:
- 1) Setelah LP2L pusat melaksanakan pengumuman, pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi khusus, penugasan partai, dan evaluasi serta penilaian akhir, LP2L Pusat menyampaikan hasilnya berupa usulan daftar nama, nomor urut, dan daerah pemilihan bakal calon anggota DPR kepada LPC Pusat
 - 2) Setelah LP2L wilayah melaksanakan pengumuman, pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi khusus, penugasan partai, dan evaluasi serta penilaian akhir, LP2L wilayah menyampaikan hasilnya berupa usulan daftar nama, nomor urut, dan daerah pemilihan bakal calon anggota DPRD Provinsi kepada LPC wilayah

**ANALISA TERHADAP REKRUTMEN CALEG MENURUT PASAL 7
POINT (e) UU. NO 31 TAHUN 2002 DAN UU. NO 12 TAHUN 2003
DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH DI DPW PPP JATIM**

Mencermati ketentuan-ketentuan di atas dapat diketahui bahwa partai politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Partai politik memainkan peran sebagai penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Banyak kalangan berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi. Artinya, semakin tinggi peran dan fungsi partai politik, akan semakin berkualitas demokrasi. Partai politik sebagai alat perjuangan bangsa akan berjalan baik seiring dengan optimalisasi peran-peran partai politik, baik sebagai sarana komunikasi politik (*political communication*), sosialisasi politik (*political socialization*), rekrutmen politik (*political recruitment*), dan pengatur konflik (*conflict management*).

Sejauh pengamatan penulis terhadap implementasi proses rekrutmen yang telah diadakan di DPW PPP Jatim, telah mengarah kepada terpenuhinya amanah undang-undang tersebut. Dengan adanya indikasi proses keterbukaan kepada publik yaitu dengan pengumuman di media massa dan surat pemberitahuan kepada seluruh kader di tingkat atas sampai paling bawah, adanya proses seleksi calon anggota legislatif.³ Dan dengan proses seleksi yang mengharuskan calon anggota legislatif untuk membawa aspirasi dari masyarakat konstituen di tingkat bawah.

Sementara pada rekrutmen calon anggota legislatif di atas partai ini juga tidak melihat faktor perbedaan diantara laki-laki dan perempuan, semuanya mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh hak politiknya lewat partai ini. Banyaknya calon anggota legislatif berasal dari kaum perempuan memberikan sumbangsih tersendiri bagi partai ini, di mana perempuan mempunyai hak yang sama untuk berpolitik. Keterwakilan para kader perempuan ini di harapkan bisa merubah wajah parlemen yang selama ini lebih didominasi oleh kaum pria. Selain itu keterwakilan kader perempuan juga harus ditopang dengan kemampuan sumber daya yang memadai. Di sinilah peran PPP dalam mewujudkan keterwakilan kaum perempuan di parlemen sesuai dengan amanat undang-undang.⁴

³ Surat Ketetapan . DPP PPP No. 1003/KPTS/DPP/VI/2008 Pasal 6 point 1

⁴ Wawancara dengan Bpk Drs. H. M. Mirdasy, S. Ip pada Hari/ Tanggal: Selasa, 8 Junii 2009 di Gedung DPRD Provinsi Jatim

[illegible]

Dalam konsep sistem politik modern, rekrutmen politik merupakan sebuah fungsi politik bagi partai politik untuk melakukan proses penempatan orang-orang tertentu dalam jabatan politik tertentu. Proses penjangkaran,

pengusungan dan pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik dan pemerintahan dikenal sebagai sebagai rekrutmen politik.

Dalam hal ini, rekrutmen politik menjadi proses penting, karena orang-orang yang dipilih untuk ditempatkan dalam kekuasaan politik merupakan orang-orang yang akan "memimpin masyarakat" atau akan memproduksi kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara luas.

Dengan mengajukan beberapa fakta sejarah dan argumentasi dalam masalah pemilihan ini, para ulama berusaha membentuk dan mengedepankan

⁷ Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*, h. 79

Sementara Ibnu Hazmin mengatakan bahwa rekrutmen politik dan pengangkatan pemimpin sah dilakukan menurut tiga cara; pertama, lebih utama dan lebih sah dengan penunjukkan oleh imam yang sedang berkuasa kepada seseorang yang dipilihnya; kedua, ketika seorang imam wafat dan dia tidak menunjuk salah seorang penggantinya, maka hendaklah seseorang yang berhak untuk memangku jabatan imamah dengan cepat memproklamasikan dirinya sebagai imam; ketiga, imam ketika merasa ajalnya telah dekat menyerahkan persoalan penggantinya kepada sebuah lembaga yang akan bertugas memilih pengganti.⁹

Ibnu Taimiyah mengatakan, bahwa untuk pengangkatan seorang dalam jabatan pemerintahan haruslah yang paling *ashlah* (paling layak dan sesuai) karena ia akan bertugas untuk mengelola persoalan kaum muslimin. Kesalahan penyerahan jabatan pemerintahan akan mengakibatkan penderitaan kaum

[illegible]

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian diatas, dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi rekrutmen calon anggota legislatif yang dilakukan oleh DPW PPP Jatim telah sesuai dengan amanat dari pasal 7 point (e) undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 yaitu melakukan rekrutmen politik dalam pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan peran gender dan UU No. 12 Tahun 2003 tentang persyaratan calon anggota legislatif.
2. Untuk implementasi rekrutmen calon anggota legislatif di DPW PPP Jatim, penulis memandang bahwa sudah terpenuhinya unsur-unsur yang telah dikemukakan oleh beberapa ulama fikih siyasah. Seperti pada persyaratan calon anggota legislatif serta pada penerapan cara pemilihannya yang menggunakan praktek pemilihan anggota melalui seleksi dalam masyarakat.

B. Saran

1. Untuk memperbaiki kualitas anggota legislatif kita yang ada di parlemen diharapkan lebih memperhatikan proses kaderisasi di internal partai
2. Pada proses penetapan calon anggota legislatif diharapkan adanya tolak ukur penilaian untuk ketua dan sekretaris partai sehingga lebih terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan
3. Pengupayaan peran serta kader perempuan di jenjang jabatan politik lebih di optimalkan untuk lebih memenuhi amanah undang-undang partai politik

DAFTAR PUSTAKA

- A. Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta, Al-Husna Zikra, 1997
- Abd. Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* Jilid III, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Abdul Azis, *Politik Islam Politik: Pergulatan Ideologis PPP Menjadi Partai Islam*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 2006
- Abdul Hamid Isma'il al-Anshari, *al-Syura wa Atsaruha fi al-Dinuqrathiyah*, Kairo, Mathba'ah al-Salafiyah, 1980
- Abul A'la al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution; Terj. Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*, Bandung, Mizan, 1995
- Ahmad Salaby, *Dasar-Dasar Pemerintahan Islam*, Jakarta, Pustaka Nasional, 1967
- Anshari Thayib, *Sistem Politik Dalam Pemerintahan Islam*, Surabaya, Bina Ilmu, 1983
- Arbi Sanit, *Perwakilan Politik Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 1985
- Arie Sujito, *Refleksi Aksi Untuk Rakyat*, Yogyakarta, IRE Press, 2004
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, CV. Rineka Cipta, Edisi V, 2002
- Bambang Cipto, *Dewan Perwakilan Rakyat; Dalam Era Pemerintahan Modern-Industrial*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1995
- Bukhari, al-Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Beirut, Darul Fikr, 1996
- CST. Kansil. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, 1986
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya, Mahkota, 1989
- Donald E. Smith, *Agama dan Modernisasi Politik; Suatu Kajian Politik*, Jakarta, Rajawali, 1985
- Fadillah Putra. *Partai politik dan Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003
- Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, Jakarta, Amzah, 2005
- Faried Ali, *Hukum Tata Negara dan Prosedur Legislatif Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997

- Ghafar Azis, *al-Islam al-Siyasi Baina al-Rafidhina Lahu wa al-Maghalina Fihi*. Terj. *Islam Politik Pro dan Kontra*. Cet. I, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1993
- Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah; Etika Politik Islam*, Surabaya, Risalah Gusti, 1998
- Imam al-Mawardi. Terj. Fadli Bahri, *al-Ahkam as-Sulthaniyah*, Beirut, Dar el-Kitab al-Araby, 2006
- J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta, Rajawali, 1996
- M. A. Qadir Abu Faris, *Hakikat Sistem Politik Islam*, Yogyakarta, PLP2M, 1987
- M. Anis Qasim Ja'far, *Perempuan dan Kekuasaan: Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender Dalam Islam*. Terjemah. Kurniawan dan Abu Muhammad, Bandung, Mizan, 1994
- Mansour Fakhir, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta, Gaya Media Pratama, 2001
- Muhammad Yusuf Musa, *An Nizom al-Hukmi fi al-Islam*, Kairo, Dar al-Ma'rifat, 1964
- Muhd. Tahir Azhary, *Negara Hukum: Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Di Lihat Dari Hukum Islam Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta, Bulan Bintang, 1992
- Mumtaz Ahmad, *State Politic and Islam; Terj. Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, Bandung, Mizan, 1996
- Nuruddin' ITR, *Peta Islam Politik Pasca – Soeharto*, Jakarta, LP3ES Indonesia, 2003
- Pimpinan Harian Wilayah Partai Persatuan Pembangunan, *Buku Pintar 2003*, Surabaya, DPW PPP Jatim, 2003
- Qomaruddin Khan, *The Political Thought of Ibn Taimiyah*, Terj. Anas Mahyuddin, *Pemikiran Politik Ibn Taimiyah*, Bandung, Pustaka, 1983
- Salim Ali al-Bahsawani, *Asy-Syari'ah al-Muftara 'alaiha*. Terj. *Wawasan Sistem Politik Islam*, Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 2004
- Siti Zuhroh, *Pergulatan Partai Politik dan Demokratisasi Di Masa Krisis*, Jakarta: PPW – LIPI, 1999

- Surat Ketetapan. DPP PPP No. 1003/KPTS/DPP/VI/2008 Tentang: Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara dan Mekanisme Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota.
- Surat Ketetapan: DPP PPP No. 181/SK/DPP/W/XII/2008 Tentang: Penunjukkan Pelaksana Tugas Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jawa Timur
- Surya Brata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta, CV Rajawali Cet.V, 1990
- Syamsudin Haris, *PPP dan Politik Orde Baru*, Jakarta, Gramedia Widia Sarana, 1991
- Taqiyuddin An-Nabhani, *Nidhamul Hukmi fil Islam; Terjemah: Sistem Pemerintahan Islam*, Bangil, Al-Izzah, 1997
- Topo Santoso dan Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu dan Mengawal Demokrasi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- [www.bpkp.go.id/ unit/ hukum/uu/2002](http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/uu/2002)
- [www. Parlemen.net](http://www.Parlemen.net)
- www.acehinstitute.org/opini_Rizwan
- www.theceli.com/dokumen/produk/2003/uu/12-2003
- Yusuf al-Qardhawy, *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*. Terj. *Fiqh Daulah Dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunah*, Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 1997